

Perbandingan Pendidikan Indonesia Dan India Tinjauan Kebijakan Terbaru

Siti Khodijah (1), Imam Hadi Kusuma (2)
E-mail: *kbadijah.khan7@gmail.com* (1), *imambadikusuma@gmail.com* (2)
STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta (1), Mahasiswa Pascasarjana IAIPM UII (2)

Abstrak

Laporan indeks pembangunan manusia UNDP 2021-22 menempatkan Indonesia lebih tinggi dibanding India, sementara di bidang Pendidikan India lebih maju dibanding Indonesia. Berangkat dari data tersebut kajian ini bertujuan menganalisa perbandingan Pendidikan Indonesia dan India dalam sudut pandang kebijakan Pendidikan terbaru. Analisa dalam artikel ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kebijakan publik perbandingan melalui studi atas dokumen publikasi rancangan kebijakan Pendidikan Indonesia bertajuk *Peta jalan Pendidikan Indonesia 2020-35* dan publikasi kebijakan pendidikan India bertajuk *National Education Policy 2020*. Hasil Analisa menunjukkan perbedaan pada beberapa aspek prinsip kebijakan pendidikan, desain penjenjangan sekolah, kurikulum dan implementasinya, penguatan bahasa asing, penerapan teknologi di sekolah sebagai bentuk prestige India di mata internasional. Persamaan nampak pada visi pendidikan meskipun ada perbedaan redaksi namun rumusan visi berangkat dari budaya bangsa dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masing-masing negara, jika India mempercayai *Jnan, Pragyaa, dan Satya* maka di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pada rumusan visi keduanya juga tidak mencantumkan frasa agama sebagai bagian dari pijakan. India dan Indonesia juga sama-sama memperkuat pendidikan *preschool* dan penguatan literasi dan numerasi pada anak-anak usia sekolah dasar.

Kata kunci: *ipm Indonesia; kebijakan pendidikan; roadmap pendidikan*

Abstract

The 2021-22 UNDP human development index report places Indonesia higher than India, while in the field of Education India is more advanced than Indonesia. Departs from these data, this study aims to analyze the comparison of Indonesian and Indian education from the perspective of the latest education policies. The analysis in this article uses the literary method with a comparative public policy approach through a study of the published documents for the draft Indonesian education policy entitled Indonesian Education Road Map 2020-35 and the publication of India's education policy entitled The National Education Policy 2020. The analysis results show differences in several aspects of the principles of education policy, school staging design, curriculum, and implementation, reinforcement of foreign languages, and application of technology in schools as a form of India's prestige in the eyes of the international community. Similarities appear in the vision of education even though there are differences in sentences but the formulation of the vision departs from the nation's culture and the noble values adopted by each country. If India believes in Jnan, Pragya, and Satya, so, in Indonesia upholds the philosophical values of Pancasila as a national ideology. In the formulation of the vision, both of them also did not include religious phrases as part of the foundation. India and Indonesia have similarities in strengthening preschools, literacy, and numeracy at the preparatory level.

Keywords: *Indonesian HDI; education policy; education roadmap*

Pendahuluan

Dalam sudut pandang kemajuan pendidikan dan ekonomi Indonesia dan India adalah sebuah paradoks, kontributor idn times Bayu. D. Wicaksono menilai India lebih inovatif dan mutakhir di bidang pendidikan dibandingkan Indonesia. India cukup jeli dalam melihat perkembangan zaman. India banyak berinvestasi pada perusahaan Teknologi Informasi (IT) dan pengembangannya di bidang tersebut. Data dari Forbes menyebut daya kompetitif di India sangat luar biasa. Inilah yang membuat banyak orang india rata-rata lebih berjaya di kancah Internasional (Wicaksono 04 November). Secara kebijakan, pemerintah India telah konsisten membangun dan mengembangkan pusat-pusat keunggulan melalui jalur pendidikan sejak awal kemerdekaan. Tiga tahun setelah India merdeka parlemen India menetapkan Institut Teknologi India di Karangpur sebagai pusat keunggulan nasional (Aalam and Selvan 2022).

Kemajuan yang dicapai India dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan tidaklah berbanding lurus dengan capaian pertumbuhan ekonomi dan indeks

pembangunan manusia. Data UNDP (*United Nation Development Programme*) tahun 2021/2022 menempatkan India diperingkat 132, sementara Indonesia berada di urutan 114 dari 191 negara (UNDP 2022, 274–75). Selain bayang-bayang kemiskinan, tingginya angka putus sekolah pada tingkat dasar dan praktek diskriminasi di lingkungan sekolah menjadi permasalahan yang tidak bisa dilepaskan di India. Laporan *Human Right Watch* (HRW) mengungkap bahwa lebih dari 40 persen anak India putus sekolah sebelum menyelesaikan kelas delapan. Sementara itu praktek diskriminasi di lingkup sekolah terjadi dalam berbagai bentuk, seperti para guru yang meminta siswa dari *dalit* (kasta terendah di India) duduk secara terpisah, penghinaan terhadap siswa muslim serta larangan siswa perempuan untuk masuk ke ruang kelas (Bajoria 2014, 36). Di sisi lain, problem pendidikan yang dihadapi Indonesia saat ini masih belum terpecahkan adalah masih adanya kesenjangan pendidikan, kurang meratanya sarana dan prasarana hingga keterbatasan di bidang teknologi dan informasi (Ihsan et al. 2021, 23). Dalam hal kebijakan, Indonesia sering kali melakukan perubahan kebijakan akan tetapi *output* yang dikeluarkan belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan (Jayanti et al. 2021, 43).

Menjawab persoalan-persoalan yang muncul di atas, India dan Indonesia sama-sama mengeluarkan kebijakan pendidikan terbaru pada 2020 lalu. India setelah 34 tahun akhirnya India mengeluarkan kebijakan pendidikan nasional baru (*National Education Policy 2020 – The NEP*). Melalui *The NEP 2020* India melakukan perubahan radikal dalam kebijakan sistem pendidikan yang telah berjalan selama 34 tahun sebelumnya, dimulai dari merubah sistem *gurukul* menjadi sistem pendidikan bercorak Britania. Kebijakan baru ini juga menghilangkan sistem penjurusan dari sistem penjurusan di sekolah digantikan dengan model integrasi kurikulum mata pelajaran esensial, keterampilan dan kecakapan sehingga saat ini siswa memiliki kebebasan memilih kombinasi mata pelajaran yang tersedia (Kalyani 2020, 2).

Di sisi lain, sistem pendidikan di Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dirumuskan Peta Kebijakan 2020-35 sebagai respon atas Pandemi Covid-19 yang mengubah secara drastic proses belajar-mengajar. Peta kebijakan

2020-35 memuat rancangan kurikulum baru, Kurikulum Merdeka, yang mana salah satu fokus tujuannya adalah untuk mengejar ketertinggalan di dalam literasi dan numerasi. Sejak tahun ajaran 2021/2022 Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di 2.499 satuan pendidikan di sekolah-sekolah peserta PSP (Program Sekolah Penggerak) dan 901 SMK-PK (Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (Anggraena et al. 2022, 73).

Dari paparan di atas, kajian ini melakukan komparasi pendidikan di Indonesia dan India, berangkat dari Analisa terhadap rancangan kebijakan terbaru yang digunakan untuk menjalankan sistem pendidikan yang ada. Berdasarkan hasil Analisa kebijakan sistem pendidikan yang ada maka akan digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari sistem pendidikan kedua negara tersebut.

Metode Penelitian

Kajian perbandingan pendidikan dalam artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan mengenai rancangan kebijakan di India dan Indonesia terbaru saat ini. Penelitian ini mengacu pada dua sumber data untuk dianalisa, yaitu publikasi dokumen rancangan kebijakan pendidikan India, *National Education Policy 2020 – The NEP 2020* yang diterbitkan oleh *Ministry Human Resource Development Government of India* dan publikasi rancangan Peta Kebijakan Pendidikan Indonesia 2020-35 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua literatur tersebut dianalisis secara deskriptif dengan mengurai, menjelaskan, dan menyampaikan kondisi obyektif tentang perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan India dan Indonesia menurut kebijakan terbaru saat ini.

Kebijakan Pendidikan India

National Education Policy 2020 merupakan kebijakan pendidikan nasional India ketiga sejak tahun 1968. Sebelumnya India sudah pernah berganti kebijakan

pendidikan pada tahun 1986 dan 1992 namun pergantian tersebut tidak ada perubahan besar dan signifikan pada saat itu. Melalui *The NEP 2020* India memiliki sistem pendidikan yang tidak ada duanya di tahun 2040, yaitu pendidikan yang adil dan berkualitas tinggi untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang status sosial ekonomi (Kalyani 2020, 1). Pemerintah India mengklaim jika *The NEP 2020* adalah kebijakan pendidikan pertama Abad XXI yang berorientasi mengatasi banyaknya tuntutan pembangunan masyarakat India. *The NEP 2020* mengusulkan revisi dan pembenahan semua aspek pendidikan termasuk regulasi dan tata kelolanya untuk menciptakan sistem baru yang selaras dengan tujuan aspirasional pendidikan India abad 21 tanpa melupakan pembangunan tradisi dan sistem nilai India. *The NEP 2020* memberikan penekanan khusus pada pengembangan potensi kreatif setiap warga negara. Hal ini didasarkan pada pemikiran filosofis India kuno bahwa tujuan tertinggi manusia adalah *Jnan* atau mengejar pengetahuan, *Pragyaa* atau kebijaksanaan, dan *Satya* atau kebenaran. Pendidikan harus mengembangkan aspek sosial seperti etika dan emosional, selain mengembangkan aspek kognitif seperti literasi dan numerasi. Pendidikan India bertujuan mengembangkan manusia yang mampu berpikir dan bertindak rasional, memiliki kasih sayang dan empati, keberanian dan ketangguhan, perilaku ilmiah dan imajinasi kreatif untuk mewujudkan masyarakat India yang adil, inklusif, dan majemuk (National Education Policy 2020 n.d., 4).

Secara spesifik prinsip dasar pendidikan India dalam *The NEP 2020* yaitu:

1. Mengidentifikasi dan memupuk kemampuan setiap peserta didik, dicapai melalui kesadaran guru dan orang tua untuk mendorong perkembangan holistik bidang akademik dan nonakademik.
2. Prioritas tertinggi adalah mencapai kemampuan dasar-dasar literasi dan numerasi, dipenuhi untuk semua siswa grade 3.
3. Fleksibilitas, siswa diberikan keleluasaan memilih jalur dan programnya sendiri dengan demikian siswa belajar menentukan jalan hidupnya sesuai bakat dan minatnya

4. Tidak ada pemisahan yang ekstrim antara seni dan sains, antara kegiatan ekstrakurikuler, antara jalur kejuruan dan akademik, dan lainnya untuk menghilangkan hirarki yang tidak menguntungkan dalam sistem, proses, dan kelembagaan dalam pembelajaran.
5. Multidisplin dan pendidikan holistik lintas ilmu. Ilmu social, seni, humaniora, dan olah raga untuk menjamin unitas dan integritas semua ilmu pengetahuan.
6. Penekanan pada pemahaman konseptual daripada hafalan dan belajar untuk ujian
7. Kreatif dan berpikir kritis untuk mendorong pengambilan keputusan dan inovasi logis
8. Berbasis pada etika, nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi, seperti empati, menghormati orang lain, kebersihan, sopan santun, semangat demokrasi, semangat melayani, menghormati milik umum, perilaku ilmiah, kebebasan, tanggung jawab, pluralism, kesetaraan, dan keadilan.
9. Mempromosikan *multilingualisme* dan kekuatan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran
10. *Lifes kill* seperti kemampuan komunikasi, bekerja sama, kerja tim, resiliansi.
11. Fokus pada asesmen formatif daripada asesmen sumatif yang menggalakkan budaya *today's coaching*.
12. Penggunaan teknologi secara ekstensif dalam pengajaran dan pembelajaran, menghilangkan hambatan bahasa, meningkatkan akses bagi siswa *Divyang*, serta perencanaan dan pengelolaan pendidikan. *Divyang* atau *Divyangjan* adalah siswa dengan kebutuhan khusus antara lain siswa penyandang multiple disability, handicap, dan warga dengan kondisi sosial ekonomi marginal (Kumar and Singh 2022, 70–71)
13. Menghormati keragaman dan konteks lokal di semua kurikulum, pedagogi, dan kebijakan, mengingat pendidikan adalah subjek bersama.

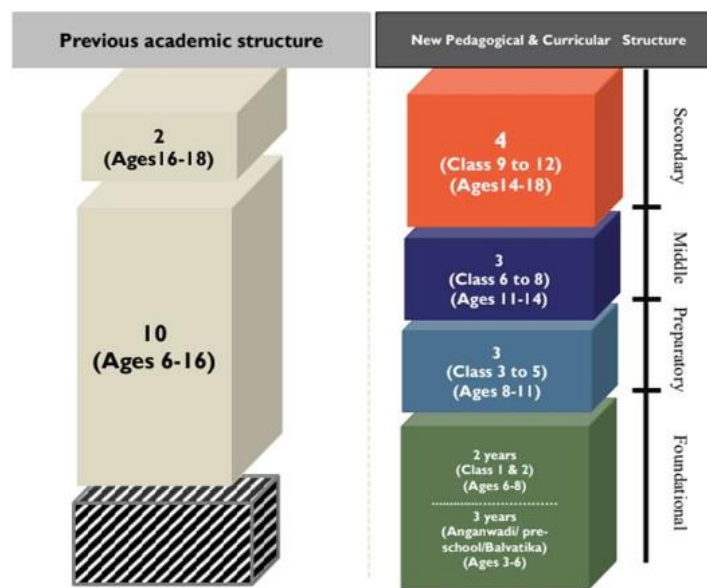
14. Kesetaraan dan inklusi sebagai basis semua keputusan pendidikan untuk menjamin semua peserta didik dapat berkembang dalam sistem pendidikan.
15. Sinergisitas kurikulum di semua jenjang pendidikan, dari preschool hingga pendidikan tinggi.
16. Guru dan bakat merupakan inti dari proses pembelajaran – perekrutan guru, pengembangan profesional berkelanjutan, lingkungan kerja yang positif, dan kondisi layanan.
17. Kerangka kebijakan yang ringan tapi ketat untuk memastikan integritas, transparansi, dan efisiensi sumber daya sistem pendidikan melalui audit dan pengungkapan publik. Mendorong inovasi dan ide out of box melalui otonomi, tata kelola yang baik, dan pemberdayaan.
18. Penelitian yang berkualitas untuk pengembangan pendidikan
19. Evaluasi berkelanjutan berdasarkan penelitian yang berkelanjutan dan monitoring oleh pakar untuk kemajuan pendidikan
20. Berakar pada kebanggaan, budaya, sistem pengetahuan, dan tradisi India yang beragam, yang kuno dan modern.
21. Pendidikan adalah layanan publik. Akses ke pendidikan berkualitas merupakan hak dasar bagi setiap anak.
22. Keterlibatan swasta dan masyarakat filantropi dalam investasi pendidikan yang besar dan kuat.

Visi sistem pendidikan yang tertuang dalam *The NEP 2020* berakar pada etos kerja India yang disebut dengan *Bharat*, yang mana secara berkelanjutan mengubah masyarakat India menjadi *knowledge society* yang pantas dan bekerja keras melalui penyediaan pendidikan berkualitas tinggi bagi semua sehingga membawa India menjadi memiliki power sebagai pusat pengetahuan global. Visi dari kebijakan ini adalah untuk menanamkan pada peserta didik kebanggaan yang mengakar sebagai warga India di dalam jiwa, akal budi, dan perbuatan mereka sebagai bentuk tanggung

jawab terhadap hak asasi manusia dan cerminan masyarakat global yang sesungguhnya.

Objek-objek pendidikan yang mengalami perubahan akibat kebijakan baru antara lain: (1) pendidikan sekolah; (2) pendidikan tinggi; (3) area-area fokus utama; (4) pengimplementasian kebijakan.

Pada pendidikan sekolah perubahan terjadi pada kurikulum dan penjenjangan akademik yang sebelumnya memiliki desain 10+2 menjadi 5+3+3+3+4 seperti pada diagram di bawah ini:



Gambar 1: perubahan penjenjangan akademik India (National Education Policy 2020 n.d., 6)

Perubahan tersebut dimaksudkan agar responsif dan relevan dengan kebutuhan perkembangan rentang usia dan minat peserta didik. Sekolah terdiri dari 4 tingkatan, *foundational*, *preparatory*, *middle*, dan *secondary*. Pendidikan dasar/*foundational* berlangsung selama 5 tahun, dibagi dalam 2 kelompok usia: usia 3 – 6 tahun berada pada kelas *pre-school/Anganwadi/Balvatika* ditempuh selama 3 tahun. Kelompok kedua adalah kelompok usia 6 – 8 tahun berada pada grade 1 dan 2. Dapat dikatakan bahwa anak-anak India memulai pendidikan formalnya pada usia 3 tahun. Kurikulum pada jenjang ini

bersifat fleksibel namun berjenjang, dan berbasis aktivitas atau permainan. Setelah menempuh 5 tahun di jenjang *Angamvadi* anak melanjutkan ke jenjang *preparatory school* selama 3 tahun. Kurikulum di jenjang *preparatory school* dikembangkan dengan basis *discovery* namun juga belum meninggalkan model aktivitas/permainan sebagaimana pada jenjang *Angamvadi*. Pada tingkat ini juga sudah dimulai belajar mata pelajaran membaca, menulis, berbicara, pendidikan jasmanu, seni, bahasa, sains, dan matematika. Selesai dari *preparatory school* anak melanjutkan ke jenjang *Middle School* selama 3 tahun. Selama 3 tahun di *Middle School* siswa dibelajarkan mengenai konsep-konsep abstrak pengetahuan dengan metode diskusi dan eksplorasi. Mereka mulai mempelajari lintas pelajaran dengan guru mata pelajaran.

Jenjang berikutnya adalah *Secondary School* yang ditempuh selama 4 tahun. Pada jenjang ini kurikulum sudah multidisiplin dan dikembangkan berbasis kompetensi. Beberapa mata pelajaran pada jenjang *Middle School* masih berlaku di jenjang *Secondary School* namun dengan isi lebih luas dan mendalam, menekankan *critical thinking*, bersifat kontekstual kehidupan sehari-hari. Siswa juga sudah mulai memilih bidang minatnya masing-masing pada grade 10, dan masuk kelas khusus peminatan pada grade 11 dan selesai pada grade 11 (National Education Policy 2020 n.d., 11–12). Pada dasarnya perubahan ini tidak cukup signifikan merubah lama waktu yang dihabiskan anak-anak India menyelesaikan pendidikan sekolah, yaitu siswa tamat pendidikan sekolah pada usia 18 tahun. Namun perubahan penjenjangan dari 10+2 yang mana anak memasuki pendidikan formal pada usia 6 tahun maka kebijakan baru ini dinilai lebih tepat untuk mendapatkan usia emas mereka.

Perubahan pendidikan dan kurikulum pada semua tingkatan pada dasarnya didorong oleh keinginan menggerakkan sistem pendidikan menuju *how to learn* dan meninggalkan budaya menghafal sebagaimana yang berjalan di India selama ini. Menyambut kompetensi abad XXI India membangun karakter bangsa dengan membentuk individu yang holistik dan berwawasan luas melalui pendidikan karena pendidikan merupakan manifestasi kesempurnaan yang ada dalam diri seseorang. Kurikulum dalam rumusan *The NEP 2020* berorientasi pada esensi mata pelajaran

sehingga membuka ruang berpikir kritis. Pembelajaran berbasis inkuiri, diskusi, dan analisis menuntun siswa pada cara belajar yang holistic. Muatan materi focus pada kata kunci, ide, aplikasi, dan pemecahan masalah. Sistem pengajaran yang interaktif, menyenangkan, teratur, eksploratif, kolaboratif memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna. Perumusan kerangka kerja kurikulum pendidikan sekolah dikembangkan oleh NCERT (*The National Council of Educational Research and Training*) yaitu Lembaga independent negara yang *concern* melakukan penelitian dan pengembangan kurikulum. NCERT akan mengidentifikasi perangkat keterampilan yang dibutuhkan dan merancang mekanisme implementasinya ke dalam kurikulum nasional India. Perubahan lain pada pendidikan sekolah adalah pembelajaran berbasis pengalaman dan transformasi perangkat asesmen belajar berbasis “*as*”, “*of*”, dan “*for*” *learning* yang berorientasi pada *outcome* dan *capability* (National Education Policy 2020 n.d., 12).

Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Rapat kerja bersama Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 10 Maret 2020 Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim membeberkan isi Peta jalan Pendidikan Indonesia 2022-35 (Cahterine 2021). Arah dari peta jalan ini adalah membangun dan membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas serta memiliki kompetensi yang baik. Visi pendidikan Indonesia 2035 yaitu *Membangun masyarakat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila* (Kemendikbud 2020, 29). Melalui visi ini diharapkan pendidikan tidak hanya berlangsung di bangku sekolah saja tetapi berlangsung seumur hidup, *long life education*, selain menjadi pembelajar seumur hidup, menjadi sumber daya manusiayang unggul juga harus menerapkan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kebijakan juga merancang kebijakan *Merdeka Belajar* yang mana kebijakan ini memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan untuk dapat menjadi agen perubahan dan memberi pengaruh serta dukungan penuh. *Merdeka Belajar* mengharapkan bahwa anak-anak Indonesia harus bersekolah dan tidak ada anak

yang tertinggal. Hal tersebut dapat dicapai apabila terdapat perbaikan pada infrastruktur dan teknologi, pendanaan, kepemimpinan, serta kurikulum dan asesmen nasional.

Pada tingkat pendidikan prasekolah difokuskan pada pengembangan keterampilan kognitif, social dan emosional, kemudian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah difokuskan pada keterampilan dasar, pengetahuan umum, serta pembentukan sikap dan nilai. Pada Pendidikan Tinggi hal yang dikembangkan adalah keterampilan teknis tingkat tinggi praktis dan kognitif. Selain tersebut, pengetahuan yang relevan dengan industry juga diperlukan dan yang tidak kalah penting adalah keterampilan dalam penelitian. Kebijakan *Merdeka Belajar* menjadi strategi utama dalam meningkatkan pendidikan di tahun 2035. Strategi yang dilakukan yaitu:

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar-sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan informal)
2. Melakukan peningkatan terhadap kualitas guru dan kepala sekolah
3. Membangun/menciptakan platform pendidikan nasional berbasis teknologi
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian
5. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah
6. Membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan
7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan
8. Mendorong kepemilikan industry dan otonomi pendidikan vokasi
9. Membentuk *world class university*
10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih

Guna menjalankan strategi *Merdeka Belajar* di atas maka pemerintah membentuk sekolah sebagai penggerak yang mempelopori adanya *Merdeka Belajar* melalui proses bimbingan, dukungan dari rekan, serta adanya pengembang teknologi dan sekolah. Sekolah yang menjadi penggerak akan menjadi penghubung serta penyalur untuk dapat mentransformasikan sekolah di sekitarnya dan sebagai pusat pelatihan Guru. Pelatihan Guru ini diharapkan dapat menghasilkan Guru yang berkualitas. Penghargaan yang tinggi untuk Guru dengan Kompetensi atau performa yang berkualitas sehingga Guru

memperoleh penghasilan yang layak. Kedepannya, pendidikan diharapkan mampu memanfaatkan penggunaan teknologi agar pembelajaran semakin efektif. Pendidikan berbasis teknologi tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung dari masing-masing sekolah. Terkait hal tersebut pemerintah berencana melakukan proses negosiasi untuk mendapatkan harga kuota yang terjangkau dengan bernegosiasi Bersama perusahaan telekomunikasi. Rencana lainnya yaitu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti memastikan jangkauan jaringan listrik dan internet yang luas dengan melibatkan perusahaan listrik negara (PLN) untuk ketersediaan listrik di seluruh sekolah.

Memastikan keberlanjutan k peta jalan ebijakan di atas dan tercapainya target dalam 15 tahun ke depan maka pemerintah menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, yaitu:

1. Mencapai 20% masa yang kritis (*critical mass*) pada semua perubahan kebijakan dan memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikan untuk beroperasi secara mandiri
2. Melakukan transformasi kepemimpinan internal yang ada di dalam Kementerian dan tingkat daerah
3. Melakukan revisi berbagai peraturan perundang-undangan (dhi. UU Sistem Pendidikan Nasional) agar para pemangku kepentingan pendidikan dapat melanjutkan kebijakan ini.
4. Mengintegrasikan peran pihak ketiga dalam sistem pendidikan seperti dunia industry dalam Perguruan Tinggi.

Terkait manajemen anggaran, Kementerian Pendidikan dalam Peta kebijakan 2020-2035 melakukan perubahan dimana lokus perubahan pendidikan ada di sekolah sehingga manajemen anggaran pendidikan harus di pusatkan di tingkat sekolah. Imbas dari kebijakan ini adalah penyaluran langsung anggaran daerah. Menerapkan manajemen anggaran berbasis sekolah dengan meningkatkan otonomi sekolah dalam penggunaan anggaran, baik untuk pengembangan sumber daya manusia maupun kebutuhan operasional yang mana sebelumnya perekrutan sumber daya manusia sekolah tergantung pada formasi pemerintah pusat daerah. Terakhir, menerapkan prinsip transparan yang

mana pemerintah menyediakan platform teknologi tunggal untuk pembelajaran sekolah nontunai (*cashless*) untuk barang dan jasa yang sudah terjaga kualitasnya.

Sejak tahun 2009 pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia dengan meningkatkan alokasi APBN untuk sektor pendidikan Rp. 332,4 Triliun di tahun 2013 menjadi Rp. 550 Triliun pada tahun 2021 (Anggraena et al. 2022, 6). Adanya peningkatan anggaran belanja negara pada sektor pendidikan telah berkontribusi positif pada perbaikan tingkat pendidikan dan kesejahteraan Guru, penurunan rasio Guru dan siswa, dan perbaikan sarana prasarana di satuan pendidikan (Anggraena et al. 2022, 6). Akan tetapi Kemendikbud menilai peningkatan tersebut tidak berbanding lurus dengan perbaikan kualitas hasil belajar siswa. Berbagai pengukuran yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa belum ada peningkatan signifikan pada kualitas pembelajaran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika hal tersebut tidak ditangani maka akan berdampak pada Krisis pembelajaran atau disebut sebagai *schooling ain't learning* (bersekolah namun tidak belajar). Atas dasar problematika tersebut maka muncullah gagasan untuk merancang kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum Merdeka (Anggraena et al. 2022, 7).

Kurikulum merdeka yang dirancang lebih dari 2 tahun mengacu pada prinsip rancangan (*design principle*) yang disepakati dan dirujuk dari berbagai kajian dan praktik pendidikan. Landasan utama perancangan Kurikulum Merdeka adalah filosofi Merdeka Belajar yang juga menjadi landasan kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya (Anggraena et al. 2022, 27–28). Kebijakan tersebut telah mendorong adanya perubahan paradigma kurikulum dan pembelajaran. Perubahan paradigma yang dituju antara lain menguatkan kemerdekaan Guru sebagai pemegang kendali dalam proses pembelajaran, melepaskan control standar-standar yang terlalu mengikat dan menuntut proses pembelajaran yang homogen di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, menguatkan *student agency* yaitu hak dan kemampuan peserta didik untuk menentukan proses pembelajaran melalui penetapan tujuan belajarnya, merefleksikan kemampuannya, serta mengambil langkah

proaktif dan bertanggung jawab untuk kesuksesan dirinya. Sein itu filosofi Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara juga menjadi landasan penting dalam merumuskan prinsip perancangan kurikulum. Menurut Dewantara, kemerdekaan merupakan tujuan pendidikan sekaligus sebagai prinsip yang melandasi strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dari dua landasan utama tersebut maka prinsip yang menjadi pegangan proses perancangan kurikulum merdeka adalah:

1. Sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan
2. Fokus pada kompetensi dan karakter
3. Fleksible
4. Selaras
5. Bergotong royong
6. Memperhatikan hasil kajian dan umpan baik

Analisis Komparatif Kebijakan

Secara garis besar jbaran kebijakan pendidikan dua negara tersebut dapat ditarik variabel-variabel kunci sebagai dasar Analisa untuk menjawab problem utama dalam penelitian ini, yaitu persamaan dan perbedaan serta keunggulan dan kelemahan. Secara runut Analisa akan disajikan melalui tabulasi dari variable-variabel kunci yang ditarik dari paparan singkat mengenai kebijakan pendidikan India dan Indonesia di atas. Variabel-variabel tersebut meliputi: visi, tujuan, landasan nilai, focus, prinsip, dan struktur kurikulum.

Variabel	India	Indonesia
Visi	Nilai kebangsaan ditanamkan tidak hanya pada ranah pemikiran tetapi juga dalam semangat, kecerdasan, perbuatan, serta untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan watak yang mendukung komitmen bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia, pembangunan, dan	<i>Membangun masyarakat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila</i>

	kehidupan yang berkelanjutan dan kesejahteraan global yang mencerminkan warga India sebagai warga global.	
Tujuan	Untuk mengembangkan manusia baik yang mampu berpikir dan bertindak rasional, memiliki kasih sayang dan empati, keberanian dan ketangguhan, perilaku ilmiah dan imajinasi kreatif dengan bersandar pada etika dan nilai-nilai kemanusiaan.	Menciptakan sumber daya manusia yang unggul yang dibutuhkan di masa depan, terpelajar, luhur, adaptif dan kolaboratif untuk mencapai target pembangunan 2045
Landasan nilai	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jnan</i> (mengejar pengetahuan); • <i>Pragyaa</i> (kebijaksanaan); • <i>Satya</i> (kebenaran) 	<ul style="list-style-type: none"> • Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia; • Mandiri; • Bernalar kritis; • Berkebhinekaan global; • Gotong royong; • Kreatif, semua dirangkum dalam profil pelajar Pancasila.
Fokus	<ul style="list-style-type: none"> – Pendidikan prasekolah sebagai bagian dari pendidikan formal; – Penguatan literasi dan numerasi; – Memastikan akses pendidikan berlaku untuk semua kalangan; – Mengurangi angka putus sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jenjang khususnya di pendidikan prasekolah dan pendidikan tinggi; – Menerapkan sistem kolaborasi dan pembinaan antarsekolah TK-SD-SMP-SMA, pendidikan informal dengan mendirikan sekolah penggerak dan program pembelajaran sebaya. – Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah – Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi
Prinsip	23. Mengidentifikasi dan memupuk kemampuan setiap	– Sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan

-
- | | |
|---|---|
| peserta didik melalui kesadaran guru dan orang tua untuk mendorong perkembangan holistic bidang akademik dan nonakademik. | – Fokus pada kompetensi dan karakter |
| 24. Siswa mencapai kemampuan literasi dan numerasi dasar pada usia grade 3 | – Fleksible |
| 25. Siswa diberikan kebebasan memilih jalur dan program belajarnya sesuai bakat dan minatnya. | – Selaras |
| 26. Menghilangkan hirarki dalam sistem, proses, dan kelembagaan dalam pembelajaran | – Bergotong royong |
| 27. Multidisplin | – Memperhatikan hasil kajian dan umpan baik |
| 28. Menekankan pemahaman konseptual daripada hafalan | |
| 29. Berpikir kreatif dan kritis untuk mendorong pengambilan keputusan dan inovasi logis | |
| 30. Menganut etika dan nilai-nilai kemanusiaan | |
| 31. Mempromosikan <i>multilingualisme</i> dan kekuatan bahasa | |
| 32. Mengacu pada <i>lifeskill</i> | |
| 33. Focus pada asesmen formatif daripada sumatif | |
| 34. Ekstensif dalam penggunaan teknologi belajar | |
| 35. Menghormati keragaman dan budaya local | |
| 36. Setara dan inklusif | |
| 37. Sinergisitas kurikulum | |
| 38. Pendidik dan rumpun keilmuan sebagai pusat proses pembelajaran | |
| 39. Kerangka kebijakan memastikan integritas, transparansi, dan efisiensi | |
-

<p>40. Penelitian dan pengembangan pendidikan yang ditinjau secara berkelanjutan</p> <p>41. Berakar pada budaya dan kebanggaan India.</p> <p>42. Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak</p> <p>Keterlibatan swasta dan masyarakat filantropi dalam investasi pendidikan yang besar dan kuat</p>	<hr/> <p>Struktur kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pembelajaran bersifat holistik, terintegrasi, menyenangkan dan partisipatif – Restrukturisasi kurikulum dan pendidikan ke dalam desain baru 5+3+3+4 – Mengurangi isi kurikulum untuk mengembangkan pemikiran kritis – Memberdayakan kemandirian siswa dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk menentukan pilihan mata pelajaran yang akan diikuti – Multilingualisme dan menekankan kekuatan bahasa – Integrasi kurikulum mata pelajaran esensial dan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> – Merdeka belajar – Perubahan status mata pelajaran – Wewenang satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional – Struktur kurikulum dibagi menjadi intrakurikuler dan project penguatan profil pelajar Pancasila – Menyediakan mata pelajaran pilihan – Fokus pada kebahagiaan holistic – Penyederhanaan isi kurikulum – Berorientasi pada kompetensi – Dikembangkan Bersama industry dan ahli <hr/>
---	---	--

Berdasarkan tabulasi diatas pada aspek visi antara kebijakan pendidikan India dan Indonesia terdapat kesamaan yang terlihat jelas bahwa dua negara ini tidak mencantumkan secara eksplisit frasa agama, keduanya sama-sama berorientasi pada semangat penanaman nilai-nilai kebangsaan. Terkai apa yang ingin dicapai kedepanya India dan Indonesia samasama memiliki tujuan jangka panjang dan berkelanjutan.

Indonesia menekankan pada pendidikan sepanjang hayat sementara India melalui pendidikan mendukung pembangunan kehidupan dan kesejahteraan berkelanjutan dalam skala global. Dalam hal cakupan yang ingin dicapai nampak jelas jika India memiliki cakupan tujuan yang lebih luas tidak hanya untuk Negerinya sendiri namun pada kancan internasional.

Pada aspek tujuan terlihat perbedaan yang mencolok antara India dan Indonesia. India lebih berorientasi pada menanamkan nilai sebagaimana makna konseptual dari “pendidikan” itu sendiri sebagai upaya transfer nilai. Hal ini terlihat dari kalimat “untuk mengembangkan manusia yang baik yang mampu berpikir dan bertindak rasional, memiliki kasih sayang dan empati, keberanian dan ketangguhan, tempramen ilmiah dan imajinasi kreatif dengan tambatan dan nilai etika yang baik. Sementara Indonesia lebih berorientasi kepada transfer ilmu yang lebih pragmatis untuk menghadapi tantangan dunia industri dengan menyebutkan jika tujuan dari kebijakan pendidikan adalah menciptakan SDM yang unggul di masa yang akan datang. Makna konseptual dari pendidikan seolah tergerserkan tidak lagi menjadi transfer nilai melainkan transfer ilmu untuk tujuan yang lebih pragmatis.

Pada aspek nilai kebijakan pendidikan Indonesia dirancang diatas dua landasan nilai utama yaitu budaya Indonesia dan Pancasila. Dua landasan tersebut kemudian terimplemenasikan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam struktur kurikulum Merdeka (Anggraena et al. 2022, 57). Proyek ini dirancang sebagai upaya untuk menguatkan pengembangan profil pelajar Pancasila dengan enam dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; mandiri; berkebinekaan global; bergotong royong; bernalar kritis; dan kreatif. Sementara India, berangkat dari warisan pengetahuan dan pemikiran filsafat india kuno yang mana kebijakan pendidikan India disusun untuk mengejar pengetahuan (*Jnan*), kebijaksanaan (*Pragyaa*) dan kebenaran (*Satya*) kerana tiga dasar nilai ini dalam pemikiran dan filsafat India dianggap sebagai tujuan tertinggi manusia.

Peta kebijakan pendidikan Indonesia khususnya dalam kebijakan merdeka belajar sebagaimana tercantum pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 lebih berfokus pada

pengembangan karakter dan ketrampilan lunak (*soft skills*) dan akomodatif terhadap kebutuhan individu di dunia. Filosofi merdeka belajar melalui pengembangan budi pekerti yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi dasar dalam pengembangan karakter (Anggraena et al. 2022, 28). Budi Pekerti mengarah pada pengembangan kemampuan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat (*long life learning*) yang memiliki kemampuan untuk mengatur diri menentukan arah belajar mereka. Sementara Kebijakan baru pendidikan India 2020 menjadikan tujuan pendidikan india bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan sebagai bekal hidup di dunia melainkan untuk merealisasikan dan membebaskan diri sepenuhnya. Tujuan ini di dasarkan pada kejayaan tujuan pendidikan masa lalu india itu sendiri yang mana India pernah memiliki institusi pendidikan perguruan tinggi kelas dunia Takshashila (universitas pertama di dunia), Nalanda sebagai pusat pendidikan agama Buddha dari tahun 427, Vikramshila, Vallabhi. Kejayaan sistem pendidikan India di masa lalu menjadi panduan India dalam merancang tujuan kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan India di masa lalu yang menghasilkan sarjana besar yang berkontribusi banyak untuk pengetahuan dunia di berbagai bidang seperti matematika, astronomi, metalurgi, ilmu kedokteran dan bedah, teknik sipil, arsitektur, pembuatan kapal dan navigasi, yoga, seni rupa, catur, dan banyak lagi (National Education Policy 2020 n.d., 4). Melalui *The NEP 2020* India ingin terus memelihara dan melestarikan warisan masa lampau India dimana budaya dan filosofi India memiliki pengaruh kuat untuk peradaban dunia. Semangat menjaga dan melestarikan budaya masa lalu ini lah yang tidak ada dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Banyak para ahli pendidikan mengatakan bahwa peta jalan pendidikan nasional Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai Indonesia (Paramita et al. 2021, 59).

Selanjutnya pada aspek kurikulum, India dan Indonesia sama-sama menekankan pada kemampuan literasi dan numerasi. Indonesia dan India memiliki problematika yang sama terkait adanya krisis pembelajaran khususnya pada kemampuan membaca dan berhitung dasar. Indonesia bahkan memasukan program penguatan kemampuan literasi dan numerasi siswa kedalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2025 (Anggraena et al. 2022, 28). Dalam konteks pengembangan kurikulum yang

membedakan adalah India berfokus pada penanaman kemampuan dan penguatan multibahasa. Dalam hal bahasa, khususnya bahasa Inggris India sudah jauh di depan dibandingkan Indonesia. Bukti keberhasilan ini bisa dilihat bagaimana sumberdaya india sudah mampu bersaing di kancah internasional, sedangkan Indonesia saat ini masih berkuat pada pengembangan dan penyediaan sumberdaya manusia untuk kebutuhan industri dalam negeri dengan menyusun kurikulum yang melihatkan dunia industri tanah air.

Salah satu poin menarik yang perlu dikaji dalam artikel penelitian ini adalah pada aspek penguatan pengetahuan teknologi, karena antara India dan Indonesia sama-sama memasukan isu perkembangan teknologi kedalam rancangan kebijakan pendidikan. India menempatkan isu ini pada prinsip kebijakan pendidikan dengan menjadikan teknologi untuk digunakan secara ekstensif dalam pengajaran dan pembelajaran. Sementara Indonesia menjadikan teknologi sebagai basis untuk membangun platform pendidikan nasional untuk menciptakan lingkungan belajar yang masa depan dengan memanfaatkan teknologi. Pendidikan dan teknologi memiliki hubungan yang kuat di India, teknologi tidak sebatas hanya dijadikan sebagai media namun juga diintegrasikan ke dalam pendidikan di semua aspeknya. Dalam konteks ini India mendirikan badan otonom yakni, *National Educational Technology Forum* (NETF) untuk mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dan pengintegrasian teknologi ke dalam pendidikan (National Education Policy 2020 n.d., 56). Tujuan dari NETF adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan tentang pengenalan, penyebaran dan penggunaan teknologi dan menyampaikan temuan temuan hasil penelitian terbaru mengenai perkembangan teknologi kepada para *stakeholder* pendidikan mulai dari pimpinan Sekolah, Pemerintah Negara bagian maupun pusat dan para pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, *The NEP 2020* memberikan perhatian khusus pada bidang perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam sistem pendidikan melalui pendidikan tinggi India.

Berbeda dengan India dalam hal isu perkembangan teknologi, Indonesia meletakkan isu ini masih sebatas pada media platform untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran. Berdasarkan peta kebijakan pendidikan Indonesia, implementasi penguatan teknologi dalam pendidikan khususnya di sekolah difokuskan pada dukungan infrastruktur

teknologi di sekolah-sekolah seperti penyediaan jaringan internet dan pemenuhan kebutuhan perangkat. Sementara dalam aspek pembelajaran difokuskan dengan membangun ruang kelas berbasis digital. Tidak seperti India yang secara khusus mendirikan badan khusus untuk penguatan teknologi bidang pendidikan, Indonesia masih sebatas pada tahap pemanfaatan teknologi yang semula dilakukan secara manual kini berubah memanfaatkan platform berbasis teknologi seperti membangun platform berbasis teknologi untuk proses pembelajaran (*e-learning*), portal untuk pelatihan guru, platform internet untuk pengelolaan anggaran dana BOS dan integrasi data untuk meningkatkan akuntabilitas dan kemampuan pemantauan Sekolah. Dari sini dapat disimpulkan jika dalam hal teknologi pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dengan India, yang mana teknologi tidak sebatas digunakan atau diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Dalam hal penguatan teknologi India tidak hanya fokus pada pengembangan namun mengajarkan ketrampilan dengan menggandeng mitra institusional maupun non institusional.

Terakhir perbedaan pada aspek penguatan kemampuan bahasa dimana poin ini sama sekali tidak muncul pada kebijakan pendidikan Indonesia. India menempatkan bahasa pada prinsip kebijakan pendidikan untuk mempromosikan multibahasa dalam pengajaran dan pembelajaran mulai dari pendidikan prasekolah. India memberikan perhatian khusus dalam hal bahasa dengan adanya upaya yang besar dari pemerintah pusat dan negara bagian dengan menyediakan guru bahasa dalam jumlah yang besar dan mempersiapkan buku teks *bilingual* untuk pelajaran sains dan matematika. Sehingga siswa diharapkan mampu untuk berfikir dan berbicara mengenai pelajaran sains dan matematika baik dalam bahasa ibu maupun bahasa Inggris. Menariknya selain penguatan pada kemampuan bahasa, kebijakan pendidikan India menaruh perhatian khusus pada Sansekerta sebagai bahasa literatur sastra klasik India. Hal ini dikarenakan dalam literatur klasik India banyak menyimpan pengetahuan pengetahuan warisan peradaban masa lalu India dalam bidang matematika, filsafat, tata bahasa, musik, politik, kedokteran, arsitektur dan banyak lagi yang dikenal sebagai “Sistem Pengetahuan Sanskerta”. Untuk

itu bahasa sansekerta menjadi mata pelajaran yang ditawarkan dari tingkat Sekolah hingga jenjang pendidikan tinggi.

Melihat Kelebihan dan Kekurangan Studi Perbandingan

Kebijakan pendidikan adalah tentang apa yang dilakukan oleh negara terhadap kebutuhan dasar kita sebagai warga negaranya. Membandingkan kebijakan pendidikan dua atau beberapa negara tidak perlu dikatakan bahwa perbandingan adalah jantung dari setiap upaya menunjukkan ketidakmampuan negara dalam merancang sistem pendidikan, tetapi sebagai salah satu cara untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi pola intervensi negara dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi variabel. Secara singkat membandingkan untuk menarik kesimpulan perbedaan dan persamaan kebijakan pendidikan antarnegara (Fischer, Miller, and Sidney 2015, 385–91).

Berdasarkan analisa perbedaan dan persamaan yang telah diuraikan diatas, maka diketahui kelebihan dan kelemahan pendidikan India dan India ditinjau dari rancangan kebijakan pendidikan dua negara tersebut sebagai berikut:

1. Secara konseptual kebijakan pendidikan India merepresentasikan model pendidikan yang tidak *ahistoris* dengan mengakomodir warisan kemajuan peradaban pendidikan masa lalu ke dalam sistem pendidikan saat ini. Hal ini bisa dilihat dari kebesaran Takshashila dan Nalanda menjadi *role model* bagaimana sistem pendidikan dirancang, kemudian tetap diajarkannya sistem pengetahuan Sansekerta yang menyimpan ragam warisan pengetahuan masa lalu India pada setiap jenjang pendidikan, dari dasar hingga perguruan tinggi. Poin ini yang tidak ada dalam rancangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Padahal, jika kita lihat dalam konteks kemajuan peradaban pendidikan Indonesia di masa lalu, bangsa Indonesia tidaklah kalah dari India. Dalam hal pendidikan misalnya, Indonesia memiliki pesantren sebagai sistem pendidikan tertua yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah lahirnya sistem Sekolah di Indonesia. Jika para pemangku kebijakan di Indonesia melakukan hal yang sama seperti India, problem literasi semestinya sudah tidak menjadi problem utama yang menjadi fokus perhatian pendidikan saat ini. Karena apa yang dikembangkan dalam kurikulum merdeka saat ini mengenai penguatan literasi sudah dilakukan jauh lebih dalam sistem

pendidikan di pesantren melalui metode sorogan, bandongan. Lebih dari itu pada aspek bahasa apa yang dilakukan India dalam rangka penguatan multibahasa adalah hal yang sudah ditarpkan dalam sistem pendidikan pesantren dengan menerapkan penguatan pengetahuan berbahasa asing seperti bahasa arab bahkan bahasa inggris untuk beberapa pesantren modern.

2. Dalam hal penguatan bahasa India lebih unggul dibandingkan Indonesia. Bahasa adalah aspek yang tidak ada dalam peta kebijakan pendidikan Indonesia.
3. Dalam hal teknologi dan informasi walaupun dalam peta rancangan pendidikan indonesia menyebut jika unsur teknologi menjadi salah satu point penekanan dalam kurikulum pendidikan namun pada prakteknya penggunaan teknologi hanya sebatas pada media ajar (dari tatap muka menjadi tatap maya) dan platform dalam pengelolaan pendidikan. Sementara India aspek teknologi dan informasi menjadi sebuah ketrampilan yang diajarkan dalam pendidikan. Lebih dari itu, kini India sudah fokus dalam pengembangan pengetahuan mengenai teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dengan mendirikan badan otonom khusus yang diberi nama National Educational Technology Forum
4. Meskipun dalam beberapa hal pendidikan India lebih maju dibanding Indonesia namun pada aspek pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak memperoleh pendidikan tanpa memandang ras agama dan kelompok India masih tertinggal dibanding Indonesia. Ini bisa dilihat dari munculnya kebijakan diskriminatif dibawah Perdana Menteri Narendra Modi terkait larangan penggunaan jilbab dilingkup pendidikan (Satria 2022). Kebijakan diskriminatif tersebut justru menjadi sebuah kemunduruan bagi India di tengah semangat dalam pemenuhan pemerataan pendidikan tanpa membeda-bedakan ras agama dan golongan sebagaimana tercemin dalam visi dan tujuan rancangan kebijakan pendidikan baru India 2020.

Penutup

Berdasarkan pemaparan analisa yang telah dilakukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan jika ditinjau berdasarkan kebijakan pendidikan terbaru saat ini, pendidikan India dan Indonesia berbeda dalam beberapa aspek yaitu,

pada prinsip penyelenggaraan, penguatan kemampuan berbahasa dan pengembangan dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sementara kesamaannya bisa dilihat pada dasar penyusunan visi yang tidak mencantumkan frasa agama, lalu pada struktur kurikulum yang sama sama berfokus dalam hal penguatan literasi dan numerasi. Selain itu dalam kebijakan pendidikan terbaru saat ini antara India dan Indoneisa keduanya sama-sama berfokus pada peningkatan partisipasi pendidikan anak prasekolah. Akan tetapi dalam hal pemerataan dan pemenuhan hak pendidikan, Indonesia lebih baik dibanding India. Begitu juga tidak hadirnya frasa agama menimbulkan kegelisahan warga negara terhadap hilangnya pengakuan dan perlindungan negara terhadap agama.

Dari keseluruhan analisa yang telah dipaparkan dalam artikel ini secara konseptual komparasi pendidikan antara India dan Indonesia ditinjau dari kebijakan terbaru saat ini diharapkan mampu memberikan wacana baru dalam diskursus pemikiran terkait model sistem pendidikan yang ideal dengan menjadikan India sebagai contoh bagaimana sistem pendidikan dari suatu negara berkembang mampu menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dikancah internasional. Sementara secara praktis temuan-temuan dalam analisa penelitian diharapkan mampu menjadi masukan terhadap peta kebijakan pendidikan Indonesia saat ini.

Daftar Pustaka

- [Aalam, C. Syed, and S. Arul Selvan. 2022. "Education Policies in India since Independence: A Review." *Ijreset Journal For Research in Applied Science and Engineering Technology*: 4158.
- Anggraena, Yogi et al. 2022. "Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran." <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/24972>.
- Bajoria, Jayshree. 2014. *"They Say We're Dirty": Denying an Education to India's Marginalized*. New York: Human Rights Watch.
- Cahterine, Rahel Narda. 2021. "Di Komisi X, Nadiem Sebut Peta Jalan Pendidikan Yang Disorot Masih Pra-Konsep." *detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5487973/di-komisi-x-nadiem-sebut-peta-jalan-pendidikan-yang-disorot-masih-pra-konsep>.
- Fischer, Frank, Mara Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik Dan Metode*. Bandung: Nusamedia.
- Ihsan, Reza Amin Nur et al. 2021. "PROBLEMATIKA DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1(1): 17–26. <https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/280> (April 12, 2023).
- Jayanti, Gita Dwi, Farid Setiawan, Rivaldo Azhari, and Nursaima Putri Siregar. 2021. "ANALISIS KEBIJAKAN PETA JALAN PENDIDIKAN NASIONAL 2020-2035." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan* 6(1): 40–48. <https://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/JPDK/article/view/618> (April 12, 2023).
- Kalyani, Pawan. 2020. "An Empirical Study on NEP 2020 [National Education Policy] with Special Reference to the Future of Indian Education System and Its Effects on the Stakeholders." <https://zenodo.org/record/4159546> (April 12, 2023).

Kemendikbud. 2020. "Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035."

Kumar, Deep, and Madhu Singh. 2022. "India's New Education Policy (NEP) 2020 Creating Children with Disability." *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*: 70–74. <http://ijarsct.co.in/febi1.html> (April 14, 2023).

"National Education Policy 2020."
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.

Paramita, Ainun Amaliya et al. 2021. "Analisis Draf Kebijakan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 Dan Perannya Terhadap Pendidikan Islam." *AJP* 1.

Satria, Lintar. 2022. "Larangan Hijab Perdana Ketegangan Hindu-Muslim India." <https://internasional.republika.co.id/berita/r8snre370/larangan-hijab-perdalam-ketegangan-hindumuslim-india>.

UNDP, Team. 2022. *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives : Shaping Our Future in a Transforming World*. New York, New York: United Nations Development Programme.

Wicaksono, Bayu D. 04 November. "Pendidikan Indonesia Vs. India: Haruskah Kondisi Ekonomi Jadi Alasan?" 2018.
<https://www.idntimes.com/life/education/bayu/perbandingan-pendidikan-di-indonesia-dan-india>.

]